

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara berkembang dimana kondisi ekonomi sedang dalam tahap membangun serta dihadapkan beberapa permasalahan seperti permasalahan pengangguran, kependudukan dan ketenagakerjaan. Salah satu hal yang mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang terjadi di Indonesia yaitu kondisi kependudukan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan penduduk serta tidak diimbangi oleh pemerataan penduduk. Apabila jumlah penduduk yang besar serta di ikuti dengan kualitas penduduk yang memadai maka hal itu akan bisa terjadi pendorong dalam hal pembangunan ekonomi. Dan sebaliknya, jika jumlah penduduk yang besar tetapi tidak di ikuti dengan kualitas penduduk yang memadai maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu peran kependudukan dalam pembangunan ekonomi dapat dijadikan sebagai suatu modal.(Sukirno, 2013).

Di Provinsi Jawa Timur perekonomian dapat dikatakan memuaskan yaitu terjadi pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mencapai 7,5 persen, dengan hasil tersebut di lihat dari beberapa pengamat bahwa akan terjadi realisasi pengembangan wilayah dan pembangunan dikarenakan di provinsi ini mempunyai suatu karakter yang kuat dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini dapat

menunjukkan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur yang ditunjukkan dari nilai PDRB nya memiliki peran yang cukup strategis di tataran nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dapat tumbuh lebih besar lagi jika ditopang oleh keterkaitan antar sektor perekonomian yang baik. Dan sebaliknya jika terjadi kesenjangan maka hal ini pada akhirnya akan dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan dalam proses pembangunan suatu wilayah yang ingin dicapai.

Di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pemerintah melakukan pengelompokan wilayah dimana hal tersebut dilakukan untuk membuat perekonomian yang lebih merata dan seimbang berdasarkan fungsi wilayah perda Provinsi Jawa Timur tahun 2006 no 2 pasal 9. Di Provinsi Jawa Timur SWP terbagi menjadi 9 wilayah yakni (Gerbangkertasusila, Malang Raya, Madiun dan sekitarnya, Kediri dan sekitarnya, Probolinggo-Lumajang, Blitar, Jember dan sekitarnya, Banyuwangi, Madura dan Kepulauan). Kawasan Gerbangkertasusila merupakan kawasan yang berpusat di Kota Surabaya dan terbesar kedua setelah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta. Kawasan Gerbangkertasusila juga dikenal sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur. Berdasarkan rencana wilayah tersebut memiliki beberapa tata ruang serta terdapat 7 kelompok wilayah yang digunakan sebagai SWP atau satuan wilayah pembangunan. Terdapat beberapa wilayah yang dibahas dalam penelitian adalah kawasan SWP Gerbangkertasusila diantaranya dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten serta Kota

Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, dan yang terakhir Kabupaten Gresik. Gerbangkertasusila atau di sebut juga GKS merupakan suatu kawasan yang dikenal sebagai kawasan strategis nasional di Indonesia. Berdasarkan pemilihan SWP Gerbangkertasusila terdapat alasan yang dilakukan yaitu sebagai objek penelitian dikarenakan SWP Gerbangkertasusila dapat dipertahankan untuk berfungsi menjadi kawasan sebagai pusat dari pertumbuhan suatu wilayah nasional dalam pengembangan wilayah di sekitar maupun Indonesia bagian timur. Salah satu hal terpenting dalam kemakmuran SWP Gerbangkertasusila Provinsi Jawa Timur yaitu dengan melihat seberapa meningkat atau turunnya dari kontribusi PDRB perkapita di tiap wilayah, dikarenakan dalam PDRB per kapita tersebut mempunyai hubungan satu sama lain dengan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Dalam melihat keberhasilan ekonomi dengan industrialisasi dapat dilihat dengan terciptanya lapangan kerja. Meskipun itu susah untuk dicapai dengan adanya kondisi unemployment berusaha dicapai. Penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai kuantitas dari sektor tenaga kerja yang digunakan baik dari industri kecil ataupun besar. Daya serap tenaga kerja merupakan salah satu model permintaan sektor usaha terhadap tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah berlaku. Menurut Sukirno (2013) tentang pertumbuhan ekonomi, Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan dari beberapa kegiatan dalam perekonomian yang dapat menyebabkan masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat mengalami peningkatan.

Peningkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan naiknya jumlah penduduk yang besar hal ini dapat mengakibatkan tingginya intensitas dari tenaga kerja. Apabila tingginya intensitas tenaga kerja yang semakin besar serta tidak dibarengi dengan adanya kesempatan kerja yang terbatas maka dapat menyebabkan naiknya tingkat pengangguran yang tersedia. Dengan terjadinya ini pemerintah di negara berkembang berbagai upaya selalu dilakukan dalam melakukan perbaikan perekonomian dengan tujuan kesenjangan jumlah lulusan dengan jumlah dunia kerja selain itu hal ini terjadi dikarenakan dari beberapa industri dari skala kecil maupun besar sebagian sudah menggunakan alat teknologi sebagai alat produksi untuk mempermudah pekerjaan sehingga para pencari kerja tersingkirkan dengan teknologi tersebut.

Investasi merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi bisa diartikan sebagai pengeluaran perusahaan atau pengeluaran penanaman modal perusahaan yang digunakan untuk membeli suatu barang atau perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang tersedia di dalam perekonomian (Sukirno, 2013). Dengan adanya investasi dapat mendorong terciptanya barang modal baru sehingga bisa menyerap faktor produksi, yang pada intinya dapat memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap faktor tenaga kerja atau kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang tersedia.

Di dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga tidak terlepas dari pertumbuhan masing-masing sektor dalam menyerap tenaga kerja. Indikator perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik secara atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah unit suatu barang yang dihasilkan dalam suatu daerah atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian (BPS, 2017). PDRB atas dasar harga berlaku merupakan gambaran jumlah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga berlaku setiap tahun serta digunakan untuk melihat struktur ataupun pergeseran ekonomi sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan merupakan jumlah nilai suatu barang ataupun jasa yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada satu tahun sebagai dasar serta digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Salah satu usaha dalam mengatasi ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu kebijakan upah minimum. Dalam penerapan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan upah pekerja sehingga rata-rata yang didapatkan oleh upah pekerja dapat meningkat. Menurut Mankiw (2007) upah adalah suatu kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayar. Upah yang sudah ditetapkan oleh suatu negara dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga secara pasti akan mempengaruhi tinggi rendahnya intensitas pengangguran di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertasusila dimana ada beberapa faktor yang terlibat diantaranya pertumbuhan investasi, PDRB, dan upah minimum kabupaten, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah ada pengaruh pertumbuhan investasi, PDRB, dan upah minimum kabupaten terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertasusila ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja di sebabkan karena beberapa faktor seperti faktor industri, inflasi, perdagangan, pengangguran, PDRB, tingkat upah, investasi . Maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi tiga faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, yakni faktor investasi, PDRB, dan upah minimum kabupaten.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pertumbuhan investasi, PDRB dan upah minimum kabupaten terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertasusila.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program peneliti selanjutnya.

- b. Menambah wawasan lebih luas mengenai penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertasusila
2. Bagi instansi pemerintahan
- a. Bagi pemerintahan di Kawasan Gerbangkertasusila, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seberapa besar pengaruhnya pertumbuhan investasi, PDRB dan upah minimum kabupaten terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertasusila sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan pertumbuhan perekonomian di Kawasan Gerbangkertasusila.

